

**MATRIKS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

<b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN</b>	<b>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional;</p> <p>c. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;</p>	<p>a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</p> <p>b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;</p> <p>c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem</p>

	<p>investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;</p> <p>f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate changel, dan terganggunya rantai pasokan (supply chainl telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;</p> <p>h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022;</p> <p>i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p>
Meningat :	Meningat :
Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan: UNDANG_UNDANG TENTANG KELAUTAN</p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:</p>

	UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> <b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</li> <li>2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air-dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air 'dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.</li> <li>4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian Puiiau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain dimikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta politihyang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.</li> <li>5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.</li> <li>6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataankesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.</li> <li>7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.</li> <li>8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</li> <li>2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang</li> <li>4. Kepulauan adalah suatu gugusan Pulau, termasuk bagian Pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.</li> <li>5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih Kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.</li> <li>6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.</li> </ol> </li> </ol>

<p>9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.</p> <p>10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.</p> <p>11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.</p> <p>12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.</p>	<p>7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.</p> <p>8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.</p> <p>9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata rulang.</p> <p>10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.</p> <p>11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.</p> <p>12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>ASAS DAN TUJUAN</b> <b>Pasal 2</b></p> <p>Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keberlanjutan;</li> <li>b. konsistensi;</li> <li>c. keterpaduan;</li> <li>d. kepastian hukum;</li> <li>e. kemitraan;</li> <li>f. pemerataan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

<p>g. peran serta masyarakat;  h. keterbukaan;  i. desentralisasi;  j. akuntabilitas; dan  k. keadilan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:</p> <p>a. menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim;  b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;  c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruangjuang bangsa Indonesia;  d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;  e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;  f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;  g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan  h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB III  RUANG LINGKUP  Pasal 4</p> <p>(1) Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara.  (2) Penyelenggaraan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. wilayah Laut;</li> <li>b. Pembangunan Kelautan;</li> <li>c. Pengelolaan Kelautan;</li> <li>d. pengembangan Kelautan;</li> <li>e. Pengelolaan ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut;</li> <li>f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan</li> <li>g. tata kelola dan kelembagaan</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">BAB IV WILAYAH LAUT Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.</li> <li>2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.</li> <li>3) Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.</li> <li>2) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> <li>3) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</li> </ol>	Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Pasal 7</p> <p>(1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perairan pedalaman;</li> <li>b. perairan kepulauan; dan</li> <li>c. laut teritorial.</li> </ol> <p>(2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zona tambahan;</li> <li>b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan</li> <li>c. landas kontinen.</li> </ol> <p>(3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;</li> <li>b. yurisdiksi tertentu pada zona tambahan; dan</li> <li>c. hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.</li> </ol> <p>(4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan zona tambahan Indonesia hingga larak 24 (dua puluh empat) mil laut dari garis pangkal.</p> <p>(2) Di zona tambahan Indonesia berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan</li> <li>b. menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.</li> </ol> <p>(3) Penetapan dan pengelolaan zona tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengklaim landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal.</p> <p>(2) Batas landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum ditetapkan sebagai landas kontinen Indonesia oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Landas kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang telah ditetapkan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut International Pasal 10</p> <p>(1) Laut lepas merupakan bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman</p> <p>Kawasan dasar Laut internasional merupakan dasar Laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas_batas yurisdiksi nasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas.</p> <p>(2) Di laut lepas Pemerintah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberantas kejahatan internasional</li> <li>b. memberantas siaran gelap;</li> <li>c. melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial;</li> <li>d. melakukan pengejaran seketika;</li> <li>e. mencegah dan menanggulangi pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan</li> <li>f. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.</li> </ol> <p>(3) Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain.</p>	Tetap

<p>(4) Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Di Kawasan Dasar Laut Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait.</p> <p>(2) Perjanjian atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBANGUNAN KELAUTAN Pasal 13</p> <p>(1) Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.</p> <p>(2) Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan;</li> <li>b. pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>c. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut;</li> <li>d. tata kelola dan kelembagaan;</li> <li>e. peningkatan kesejahteraan;</li> <li>f. ekonomi kelautan;</li> <li>g. pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; dan</li> <li>h. budaya bahari.</li> </ol> <p>(3) Proses penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangunan Kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangunan Kelautan terpadu jangka menengah dan jangka pendek; dan c. kebijakan Pembangunan Kelautan dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan.</p>	Tetap

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat 121 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGELOLAAN KELAUTAN Bagian Kesatu Umum Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.</p> <p>(2) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perikanan;</li> <li>b. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</li> <li>d. sumber daya nonkonvensional.</li> </ol> <p>(3) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. industri Kelautan;</li> <li>b. wisata bahari;</li> <li>c. perhubungan Laut; dan</li> <li>d. bangunan Laut.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi Kelautan.</p> <p>(2) Kebijakan ekonomi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjadikan Kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi</p> <p>(3) Basis pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penciptaan usaha yang sehat dan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, mandiri, dan mengutamakan kepentingan nasional.</p>	Tetap

<p>(4) Untuk menjadikan Kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah Laut sebagai dasar pengalokasian anggaran Pembangunan Kelautan.</p> <p>(5) Anggaran Pembangunan Kelautan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Paragraf 1 Perikanan Pasal 16</p> <p>Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan</p> <p>(2) Dalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga kelestarian sumber daya ikan;</li> <li>b. Menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan; dan</li> <li>c. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, pemerintah mengatur sistem logistik ikan nasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan suprastruktur usaha perikanan.</p> <p>(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari Laut dan ditetapkan dalam kebijakan energi nasional.</p> <p>(2) Pemerintah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari Laut di daerah dengan memperhatikan potensi daerah</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah mengatur dan menjamin pemanfaatan sumber daya mineral yang berasal dari Laut, dasar Laut, dan tanah dibawahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;</li> <li>b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan</li> <li>d. meningkatkan nilai sosial, masyarakat melalui peran pemanfaatan sumber daya kecil. ekonomi, dan budaya serta masyarakat dalam pesisir dan pulau-pulau</li> </ol>	Tetap

<p>(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Sumber Daya Alam Nonkonvensional Pasal 23</p> <p>(1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya aiam nonkonvensional Kelautan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang Kelautan. (2) Pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengusahaan Sumber Daya Kelautan Paragraf 1 Industri Kelautan Pasal 25</p> <p>(1) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan industri nasional. (2) Industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa maritim. (3) Pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, riset ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, sumber daya manusia, serta industri kreatif dan pembiayaan.</p>	Tetap

<p>(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan terhadap peningkatan kuaiitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan berskala usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).</p> <p>(2) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati.</p> <p>(3) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mencegah punahnya biota Laut akibat eksplorasi berlebih;</li> <li>b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;</li> <li>c. mengurangi ketergantungan impor dengan memproduksi berbagai produk substitusi impor;</li> <li>d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri bioteknologi Kelautan; dan</li> <li>e. me ngembangkan sistem pengelolaan sumber daya Laut secara berkesinambungan.</li> </ol>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Industri maritim dan jasa maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan pembangunan Kelautan</p> <p>(2) Dalam rangka keberlanjutan industri maritim dan jasa maritim untuk kesejahteraan rakyat, digunakan kebijakan ekonomi Kelautan.</p> <p>(3) Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. galangan kapal;</li> <li>b. pengadaaan dan pembuatan suku cadang;</li> <li>c. peralatan kapal; dan/atau</li> <li>d. perawatan kapal.</li> </ol> <p>(4) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;</li> <li>c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<p>d. reklamasi;  e. pencarian dan pertolongan;  f. remediasi lingkungan;  g. jasa konstruksi; dan/atau  h. angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritime diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2  Wisata Bahari  Pasal 28</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional.</p> <p>(2) Keberlanjutan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.</p> <p>(3) Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan.</p> <p>(4) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 3  Perhubungan Laut  Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan potensi da., meningkatkan peran perhubungan Laut.</p> <p>(2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan dan sistem pelabuhan yang andal.</p> <p>(3) Tatanan kepelabuhanan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan lokasi pelabuhan Laut dalam yang dapat melayani kapal generasi mutakhir dan penetapan pelabuhan hub.</p> <p>(4) Sistem pelabuhan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bercirikan:</p> <p>a. efisien dan berstandar internasional;</p>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. bebas monopoli;</li> <li>c. mendukung konektivitas antarpulau, termasuk antara pulau-pulau kecil terluar dengan pulau induknya;</li> <li>d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau kecil terluar;</li> <li>e. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan</li> <li>f. keterpaduan antara terminal dan kapal</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>(2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional.</li> <li>(3) Pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan Laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.</li> <li>(4) Pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan Laut melalui kebijakan perbankan nasional.</li> </ul>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pengembangan potensi perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Bangunan Laut Pasal 32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik alur pelayaran maupun alur laut kepulauan Indonesia.</li> <li>(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.</li> <li>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.</li> </ul>	<p>2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik alur pelayaran maupun alur Laut Kepulauan Indonesia.</li> <li>(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.</li> <li>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.</li> <li>(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>

<p>(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembongkaran bangunan dan instansi di laut yang sudah tidak berfungsi.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGEMBANGAN KELAUTAN Bagian Kesatu Umum Pasal 34</p> <p>Pengembangan Kelautan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. sistem informasi dan data Kelautan; dan</li> <li>d. kerja sama Kelautan</li> </ol>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyeenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan</li> <li>(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional yang berbasis kompetensi pada bidang Kelautan.</li> <li>(3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan budaya bahari.</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<p>(2) Kebijakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan jasa di bidang Kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;</li> <li>b. pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang Kelautan;</li> <li>c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi Kelautan;</li> <li>d. peningkatan gizi masyarakat Kelautan; dan</li> <li>e. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan.</li> </ol> <p>(3) Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang Kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;</li> <li>b. identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial Kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; dan</li> <li>c. Pengembangan teknologi dengan tetap mempertimbangkan kearifan local.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 37</p> <p>(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Kelautan, Pemerintah dan pemerintah Daerah mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kelautan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian pengembangan penerapan teknologi.</p> <p>(2) Dalam mengembangkan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah memfasilitasi pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, serta peizinan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kelautan, baik secara mandiri maupun kerja sama lintai sektor dan antarnegara.</p> <p>(3) Sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.</p>	<p>Tetap</p>

(4) Pelaksanaan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah Daerah membentuk pusat fasilitas Kelautan yang meliputi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilengkapi dengan prasarana kapal lith dan kapal penelitian serta tenaga fungsional peneliti.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pembentukan pusat fasilitas Kelautan serta tugas, kewenangannya, dan pembiayaannya diatur dalam peraturan pemerintah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah Kelautan dalam rangka kerja sama penelitian dengan pihak asing.</p> <p>(2) Hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sistem Informasi dan Data Kelautan Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun, menJrusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penelitian ilmiah Kelautan yang berupa data numerik beserta analisisnya;</li> <li>b. hasil penelitian yang berupa data spasial beserta analisisnya; dan</li> <li>c. pengelolaan Sumber Daya Kelautan, konservasi perairan, dan pengembangan teknologi Kelautan.</li> </ol> <p>(3) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem keamanan Laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan, dikoordinasikan, dan diintegrasikan oleh kementerian/lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

<p>(4) Sistem informasi dan data Kelautan hasil penelitian berupa data yang perlu dibuat peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disimpan, dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh lembaga penelitian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Kerja Sama Kelautan Pasal 41</p> <p>(1) Kerja sama di bidang Kelautan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional bagi kemandirian bangsa.</p> <p>(2) Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinergi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. antarsektor;</li> <li>b. antara pusat dan daerah;</li> <li>c. antarpemerintah daerah; dan</li> <li>d. antarpemangku kepentingan.</li> </ol> <p>(3) Kerja sama bidang Kelautan pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral.</p> <p>(4) Kerja sama pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.</p> <p>(5) Pemerintah mendorong aktivitas eksplorasi, pemanfaatan, dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan di laut lepas sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT Bagian Kesatu Pengelolaan Ruang Laut Pasal 42</p> <p>(1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;</li> <li>b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan</li> </ol>	<p>3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pengelolaan Ruang Laut dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;</li> <li>b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan</li> <li>c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.</li> </ol> <p>(2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.</p>

<p>c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.</p> <p>(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.</p> <p>(3) Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.</p>	<p>(3) Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan tata ruang Laut nasional;</li> <li>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</li> <li>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.</li> </ol> <p>(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.</p> <p>(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan tata ruang Laut nasional;</li> <li>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</li> <li>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.</li> </ol> <p>(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.</p> <p>(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.</p> <p>(4) Rencana zonasi kawasan strategis nasional diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional.</p> <p>(5) Dalam hal perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional.</p> <p>(6) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

	<p>5. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43A</p> <p>(1) Perencanaan mang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>(2) Perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pen5rusunan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana tata ruang Laut;</li> <li>b. rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan</li> <li>c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ol> <p>(3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(4) Rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(5) Perencanaan ruang Laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan rencana tata ruang Laut, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak tedadi tumpang tindih pengaturan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan strategis operasionaiisasi rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut;</li> <li>b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut; dan</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<p>c. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut nasional dan zonasi kawasan Laut.</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang Laut di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.</p> <p>(2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.</p> <p>(2) Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan;</li> <li>c. penutupan lokasi;</li> <li>d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; dan/atau f. denda administratif.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan di Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>(3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang diberikan, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>7. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 47A</p> <p>(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.</p> <p>(2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biofarmakologi Laut;</li> <li>b. bioteknologi Laut;</li> <li>c. pemanfaatan air Laut selain energi;</li> <li>d. wisata bahari;</li> <li>e. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;</li> <li>f. telekomunikasi;</li> <li>g. instalasi ketenagalistrikan;</li> <li>h. perikanan;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;</li> <li>k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;</li> <li>l. pengumpulan data dan penelitian; m. pertahanan dan keamanan;</li> <li>m. penyediaan sumber daya air;</li> <li>n. Pulau buatan;</li> <li>o. dumping;</li> <li>p. mitigasi bencana; dan</li> <li>q. kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>
	<p>10. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 49A dan Pasal 49E sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49A</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan;</li> <li>c. penutupan lokasi;</li> <li>d. pencabutan Perizinan Berusaha;</li> <li>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan</li> <li>f. denda administratif.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49B</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelindungan Lingkungan Laut Pasal 50</p> <p>Pemerintah melakukan upaya pelindungan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konservasi Laut;</li> <li>b. pengendalian Pencemaran Laut;</li> <li>c. penanggulangan bencana Kelautan; dan</li> </ol>	<p>Tetap</p>

d. pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, kerusakan, dan bencana.	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi Laut sebagai bagian yang integral dengan perlindungan Lingkungan Laut.</p> <p>(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kebijakan konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung perlindungan Lingkungan Laut.</p> <p>(4) Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.</p> <p>(5) Kebijakan dan pengelolaan konservasi Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pencemaran Laut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencemaran yang berasal dari daratan;</li> <li>b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan</li> <li>c. pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.</li> </ol> <p>(2) Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi;</li> <li>b. dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi; atau</li> <li>c. dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.</li> </ol> <p>(3) Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan sanksi terhadap Pencemaran Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Bencana Kelautan dapat berupa disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fenomena alam;</li> <li>b. pencemaran lingkungan; dan/atau</li> <li>c. pemanasan global.</li> </ol> <p>(2) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gempa bumi;</li> <li>b. tsunami;</li> <li>c. rob;</li> <li>d. angin topan; dan</li> <li>e. serangan hewan secara musiman.</li> </ol> <p>(3) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fenomena pasang merah (red tide);</li> <li>b. pencemaran minyak;</li> <li>c. pencemaran logam berat;</li> <li>d. dispersi thermal; dan</li> <li>e. radiasi nuklir.</li> </ol> <p>(4) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kenaikan suhu;</li> <li>b. kenaikan muka air Laut; dan/atau</li> <li>c. el nino dan la nina.</li> </ol>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam mengantisipasi Pencemaran Laut dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan Pasal 53, Pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana Kelautan.</p> <p>(2) Kebijakan penanggulangan dampak pencemaran dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sistem mitigasi bencana;</li> <li>b. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system);</li> <li>c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut</li> </ol>	<p>Tetap</p>

d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran Laut dan kerusakan ekosistem Laut; dan e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan aktivitas di Laut.	
<b>Pasal 55</b> (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.	Tetap
<b>Pasal 56</b> (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut. (2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut. (3) Pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Tetap
<b>Pasal 57</b> Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.	Tetap
<b>BAB IX</b> <b>PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAK HUKUM, DAN KESELAMATAN DI LAUT</b> <b>Pasal 58</b> (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.	Tetap

(3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</p> <p>(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</p> <p>(3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;</li> <li>b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;</li> <li>c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;</li> <li>d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;</li> <li>e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;</li> <li>f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan</li> </ol>	Tetap

g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 Keamanan Laut berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengejaran seketika;</li> <li>b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan</li> <li>c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.</li> </ol> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputy.</p> <p>(2) Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.</p> <p>(3) Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Personal Badan Keamanan Laut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pegawai tetap; dan</li> <li>b. pegawai perbantuan.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini ditetapkan.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT</b> <b>Pasal 69</b></p> <p>(1) Pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut.</p> <p>(2) Kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien.</p> <p>(3) Dalam menyusun kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah meiakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b> <b>Pasal 70</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;</li> <li>b. PengelolaanKelautan;</li> <li>c. pengembangan Kelautan; dan</li> <li>d. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.</li> </ol> <p>(4) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui partisipasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau</li> </ol>	Tetap

<p>b. perlindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjaikan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3).</p> <p>(2) Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan UndangUndang ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> Pasal 72</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> Pasal 184</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan</p> <p>b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 185</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 186</p> <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cap/ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd JOKO WIDODO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Cap/ttd AMIR SYAMSUDIN</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, /Ttd PRATIKNO</p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 294</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Cap/ttd Lydia Silvanna Djaman</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Cap/ttd Lydia Silvanna Djaman</p>